

ANALISIS KETIMPANGAN EKONOMI KOTA DEPOK 2022

KERJASAMA



DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KOTA DEPOK



DEPARTEMEN STATISTIKA
FMIPA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2022

Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2022

Ukuran Buku / *Book Size* : A4 29.7 cm × 21.0 cm

Jumlah halaman / *Total size* : 25 halaman / *page*

Naskah / *Manuscript* : Fakultas Matematika dan IPA,
IPB University

Gambar kulit dan Seting / *Cover design and Setting*: Fakultas Matematika dan IPA,
IPB University

Diterbitkan oleh / *Published by* : Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Depok

Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with the reference to the sources

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2022 dapat diterbitkan.

Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2022 ini menggambarkan ketimpangan pendapatan penduduk yang terjadi di Kota Depok. Ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan disparitas ekonomi dan kecemburuan sosial yang lebar dan tajam, dan jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan berbagai masalah. Buku ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik masyarakat maupun institusi pemerintah dan swasta.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Departemen Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (FMIPA-IPB) yang telah menyusun Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2022, begitu juga kepada semua pihak yang sudah berperan dalam penerbitan buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, Desember 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Depok,



Drs. Manto, MSi

NIP. 19670504 198612 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Pembangunan ekonomi menjadi pusat perhatian dalam melihat kemajuan suatu wilayah karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan baru bisa dikatakan berhasil jika tinggi dampaknya dirasakan secara merata oleh pertumbuhan ekonomi yang seluruh lapisan penduduk. Ketimpangan pendapatan antar penduduk memang sangat sulit dihindari, namun ketimpangan yang terjadi harus bisa dikontrol sehingga tidak menimbulkan masalah sosial ekonomi di masyarakat yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Buku Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok 2022 ini dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran bagaimana ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kota Depok.

Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kota Depok, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika yang memberikan kepercayaan kepada Departemen Statistika - FMIPA, Institut Pertanian Bogor, untuk bekerjasama menyusun buku ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak-pihak lain, khususnya Badan Pusat Statistik yang menjadi sumber data utama.

Atas nama Departemen Statistika - FMIPA IPB, kami menghaturkan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan hasil yang diperoleh. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan secara umum di Kota Depok.

Wassalamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bogor, Desember 2022
Ketua Departemen Statistika
FMIPA – IPB University



Dr. Anang Kurnia
NIP. 19730824 199702 1 001

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sumber Data.....	3
BAB II METODOLOGI	
2.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi	4
2.2. Metodologi Perhitungan Ketimpangan Ekonomi Kota Depok.....	8
BAB III GINI RATIO KOTA DEPOK	
3.1. Gambaran Umum Kota Depok.....	11
3.2. Indeks Gini Kota Depok tahun 2020	15
3.3. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2020.....	17
3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok tahun 2010-2020	18
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa).....	12
Tabel 2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Depok Tahun 2022.....	13
Tabel 3 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022.....	14
Tabel 4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran.....	15
Tabel 5 Hitung Indeks Gini Tahun 2022 di Kota Depok.....	16
Tabel 6 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok Tahun 2022.....	18
Tabel 7 PDRB Kota Depok 2012-2022 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah).....	20
Tabel 8 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2012-2022.....	21
Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok d 2012-2021.....	22
Tabel 10 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2020-2022.....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kurva Lorenz.....	9
Gambar 2 Kurva Lorenz Kota Depok 2022	17
Gambar 3 PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah).....	19
Gambar 4 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2012-2022	20
Gambar 5 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia 2020-2022	23

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan. Menurut Alexander (1994), proses perubahan ini mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertanian, pendidikan, teknologi, kelembagaan dan budaya. Salah satu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah pembangunan pada sektor ekonomi, sebuah sektor yang melibatkan seluruh komponen yang ada di wilayah yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi melibatkan sektor pemerintah, swasta dan masyarakat umum di dalamnya. Siedman (2005) menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses membuat dan memanfaatkan sumberdaya fisik, sumber daya manusia, keuangan, dan modal-modal sosial untuk menimbulkan perbaikan dan pemerataan ekonomi dan kualitas kehidupan bagi masyarakat atau wilayah.

Indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah atau wilayah bisa dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya karena dipandang berhubungan dengan kemampuan pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebut saja misalnya pemenuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat umumnya sangat berhubungan dengan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Ekonomi yang tumbuh dengan sangat baik umumnya juga mendorong terciptanya lapangan kerja dalam jumlah yang memadai bagi penduduknya dan dengan demikian akan menghasilkan wilayah dengan tingkat pengangguran yang kecil.

Indikator makro utama yang sering digunakan di berbagai perbincangan mengenai kondisi dan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhannya. Pengetahuan mengenai nilai PDRB dan pertumbuhannya dibandingkan keadaan pada waktu atau periode sebelumnya penting untuk mengevaluasi apakah strategi pembangunan

ekonomi yang sedang dijalankan oleh suatu pemerintahan telah berjalan dengan efektif.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi (Tambunan, 2001). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata seringkali menyebabkan melebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat serta kesenjangan antar daerah. Ketimpangan ini akan menyebabkan kecemburuan sosial dan ekonomi.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kota Depok selama periode 2011-2021 (tanpa melibatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020) adalah 6,71 dan nilai ini masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan Jawa Barat (tanpa melibatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020) yaitu 5,49 . Nilai tersebut secara makro dapat dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kuat. Namun dengan adanya pandemik Covid-19 yang sudah berlangsung sejak Maret 2020, pemerintah Kota Depok perlu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut untuk melihat apakah kesejahteraan masyarakat meningkat/menurun, apakah ketimpangan antar golongan masyarakat di Kota Depok masih berimbang pada tahun 2022 ini. Untuk melihat hal tersebut tentunya diperlukan alat untuk mengukur ketimpangan tersebut diantaranya dengan menggunakan gini ratio dan Ukuran Ketimpangan menurut Bank Dunia.

1.2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan analisis kondisi ketimpangan ekonomi Kota Depok tahun 2022 dengan menggunakan pendekatan Gini Ratio dan ukuran ketimpangan menurut Bank Dunia, sehingga akan diperoleh :

- a. Nilai indeks Gini Ratio Kota Depok tahun 2022 beserta kategorinya, dengan disandingkan dengan indeks Gini Ratio Kota Depok tahun-tahun sebelumnya;

- b. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok tahun 2022 beserta kategorinya, disandingkan dengan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok pada tahun-tahun sebelumnya;
- c. Analisis mengenai hasil yang ada.

1.3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam perhitungan Gini Ratio Kota Depok tahun 2022 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 khususnya data KOR (data dasar), PDRB Kota Depok 2021, dan Data Jumlah Penduduk Kota Depok 2021. Sumber data tersebut berasal dari publikasi yang diterbitkan oleh BPS Kota Depok dan BPS Pusat.

BAB II METODOLOGI

2.1. Tingkat Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi adalah distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Topik ini adalah masalah di hampir semua negara di dunia dan seringkali orang yang berada dalam kemiskinan memiliki sedikit kesempatan untuk dapat meningkatkan kondisi sosial ekonominya. Meskipun tentu saja orang yang terlahir dalam kemiskinan tidak otomatis berarti akan tetap miskin. Pendidikan, di semua tingkatan, peningkatan keterampilan, dan kebijakan pelatihan dapat digunakan bersamaan dengan program bantuan sosial untuk membantu orang keluar dari kemiskinan dan untuk mengurangi ketidaksetaraan.

Terdapat beberapa jenis ketimpangan ekonomi yang bisa disebutkan yaitu antara lain:

1. Ketimpangan Pendapatan

Ketidaksetaraan pendapatan adalah sejauh mana pendapatan didistribusikan secara tidak merata dalam sekelompok orang. Pendapatan bukan hanya uang yang diterima melalui pembayaran, tetapi semua uang yang diterima dari pekerjaan (upah, gaji, bonus, dll.), investasi, seperti bunga pada rekening tabungan dan dividen dari saham, tabungan, tunjangan negara, pensiun (negara), pribadi, perusahaan) dan sewa. Pengukuran pendapatan dapat dilakukan secara individu atau rumah tangga - pendapatan semua orang yang berbagi rumah tangga tertentu. Pendapatan rumah tangga sebelum pajak yang mencakup uang yang diterima dari sistem jaminan sosial dikenal sebagai pendapatan kotor. Pendapatan rumah tangga termasuk semua pajak dan tunjangan dikenal sebagai pendapatan bersih.

2. Ketimpangan Bayaran/Upah

Bayaran/upah seseorang berbeda dengan penghasilan mereka. Bayaran mengacu pada pembayaran dari pekerjaan saja. Ini dapat dilakukan setiap jam, bulanan atau tahunan, biasanya dibayar mingguan atau bulanan dan mungkin juga termasuk bonus. Oleh karena itu, ketimpangan pembayaran menjelaskan perbedaan antara upah orang dan ini mungkin berada dalam satu perusahaan.

3. Ketimpangan Kekayaan

Kekayaan mengacu pada jumlah total aset individu atau rumah tangga. Ini mungkin termasuk aset keuangan, seperti obligasi dan saham, properti dan hak pensiun swasta. Karena itu, ketimpangan kekayaan mengacu pada distribusi aset yang tidak merata dalam sekelompok orang.

Kajian-kajian terdahulu tentang ketimpangan pendapatan telah menemukan beberapa faktor yang berkontribusi signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebagian besar studi menemukan pendidikan menjadi faktor penting yang menciptakan kesenjangan pendapatan yang lebih luas antara si miskin dan si kaya (Chongvilaivan dan Kim 2015; De Silva dan Sumarto 2013). Beberapa penelitian juga menemukan bahwa akses ke masalah keuangan dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan (Wan dan Zhou 2004; Bae, Han, dan Son 2012). Menurut penelitian oleh World Bank (2016), ada beberapa penyebab utama ketimpangan pendapatan di Indonesia: (i) kesempatan tidak merata, (ii) pekerjaan yang tidak setara, (iii) konsentrasi kekayaan yang tinggi, dan (iv) resiliensi rendah.

Akses yang tidak merata ke pendidikan dapat menimbulkan ketidaksetaraan di masa depan karena mereka yang berpendidikan rendah cenderung melakukan pekerjaan bergaji rendah, yang biasanya di sektor sektor informal. Perbedaan dalam akumulasi kekayaan juga penting dalam menentukan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya mempengaruhi potensi penghasilan anggota rumah tangga di masa depan.

Studi oleh Wicaksono, Amir dan Nugroho (2017) menunjukkan bahwa pendidikan, kekayaan, serta sektor pekerjaan merupakan kontributor signifikan

terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang bertujuan mengurangi akses yang tidak merata ke pendidikan dan keuangan penting untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan di masa depan.

Ada berbagai cara untuk mengukur ketimpangan ekonomi. Pilihan ukuran tidak mengubah seperti apa bentuk ketimpangan secara dramatis, namun perubahan ketimpangan dari waktu ke waktu di masing-masing negara dapat terlihat berbeda jika digunakan langkah yang berbeda (The Equality Trust, 2011). Ukuran ketimpangan ekonomi yang umum digunakan:

1. Koefisien Gini

Koefisien Gini mengukur ketimpangan di seluruh masyarakat daripada hanya membandingkan berbagai kelompok pendapatan. Jika semua pendapatan pergi ke satu orang (ketimpangan maksimum) dan semua orang tidak mendapat apa-apa, koefisien Gini akan sama dengan 1. Jika pendapatan dibagi sama rata, dan semua orang mendapatkan sama persis, Gini akan sama dengan 0. Semakin rendah nilai koefisien Gini, semakin setara masyarakat.

Koefisien Gini dapat mengukur ketimpangan sebelum atau sesudah pajak dan sebelum atau setelah biaya perumahan. Gini akan berubah tergantung pada apa yang diukur. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1, jika:

- $G < 0,3$ → ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ → ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ → ketimpangan tinggi

2. Ukuran Rasio

Ukuran rasio membandingkan berapa banyak orang di satu tingkat distribusi pendapatan dibandingkan dengan orang di tingkat lain. Misalnya, rasio 20:20 membandingkan seberapa kaya 20% orang teratas, dibandingkan dengan 20% terbawah.

Rasio yang umum digunakan antara lain:

- Rasio 50/10 - menggambarkan ketimpangan antara bagian tengah dan bagian bawah dari distribusi pendapatan
- 90/10 - menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan bagian bawah
- 90/50 - menggambarkan ketimpangan antara bagian atas dan tengah
- 99/90 - menjelaskan ketimpangan antara bagian paling atas dan atas

3. Palma Ratio

Palma Ratio adalah rasio bagi hasil dari 10% teratas dengan 40% terbawah. Dalam masyarakat yang lebih setara, rasio ini akan menjadi satu atau lebih rendah, yang berarti bahwa 10% teratas tidak menerima bagian yang lebih besar dari pendapatan nasional dari 40% terbawah. Dalam masyarakat yang sangat tidak setara, rasionya mungkin sebesar 7.

4. Ukuran Ketimpangan Menurut Bank Dunia

Bank Dunia menggolongkan penduduk ke dalam 3 kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan dengan dasar pengelompokan 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi.

Ketimpangan pendapatan dengan menggunakan ukuran Bank Dunia diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara

12-17%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah;

- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%, maka distribusi pendapatan dikategorikan sebagai memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

2.2. Metodologi Perhitungan Ketimpangan Ekonomi Kota Depok

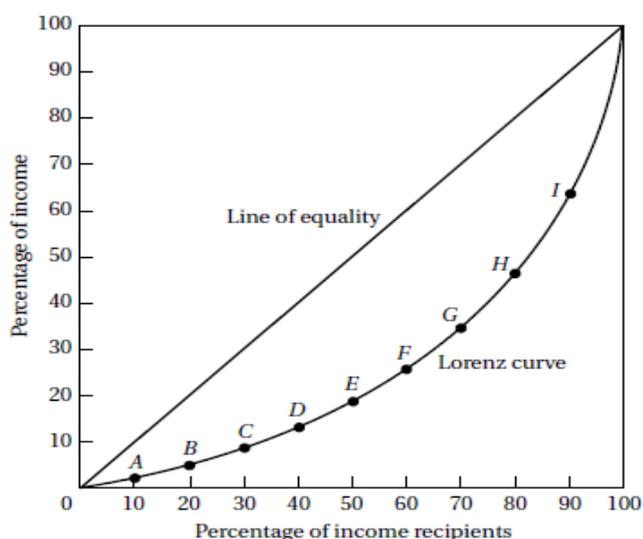
Ketimpangan ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan ekonomi di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk mengurangi ketimpangan (disparity). Peningkatan pendapatan per kapita memang menunjukkan tingkat kemajuan perekonomian suatu daerah. Namun meningkatnya pendapatan per kapita tidak selamanya menunjukkan bahwa distribusi pendapatan lebih merata.

Guna mengukur ketimpangan pendapatan per kapita diperlukan data pendapatan, namun karena data pendapatan sulit diperoleh, maka pengukuran ketimpangan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi data pendapatan.

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan suatu ketimpangan sempurna, yang berarti satu orang dalam suatu populasi menguasai semua pendapatan, sementara yang lain tidak mendapatkan apa-apa. Ide dasar perhitungan Indeks Gini sebenarnya berasal dari upaya

pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan. Untuk menghitung Indeks Gini dibutuhkan kurva Lorenz.

Kurva Lorenz secara umum sering digunakan untuk menggambarkan bentuk ketimpangan yang terjadi terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Kurva Lorenz yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Guna membentuk Indeks Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal (Gambar 1 – Kurva Lorenz). Semakin dekat kurva ini dengan diagonalnya, berarti ketimpangan semakin rendah dan sebaliknya semakin melebar kurva ini menjauhi diagonal berarti ketimpangan yang terjadi semakin tinggi.



Gambar 1 Kurva Lorenz

Adapun rumus umum Indeks Gini adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Gini} = 1 - \sum_{i=1}^n [fp_i(Fc_i + Fc_{i-1})]$$

dimana

$f p_i$: Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i

$F c_i$: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i

$F c_{i-1}$: Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- $(i-1)$

Cara lain yang juga seringkali diterapkan dalam mengidentifikasi ketimpangan pendapatan adalah kriteria yang dikemukakan oleh Bank Dunia yang mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan. Kemudian berdasarkan kriteria ini, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Adapun formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$YD_4 = Q_{i-1} - \frac{40 - P_i}{P_i - P_{i-1}} \times q_i$$

dimana

YD_4 : Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk lapisan bawah

Q_{i-1} : Persentase kumulatif pendapatan ke $i - 1$

P_i : Persentase kumulatif penduduk ke i

q_i : Persentase pendapatan ke i

BAB III GINI RATIO KOTA DEPOK

3.1. Gambaran Umum Kota Depok

Letak Kota Depok sangat strategis, diapit oleh Kota Jakarta dan Kota Bogor dengan luas wilayah sekitar 200,30 km². Lokasi strategis letak wilayah Kota Depok ini menyebabkan kota ini semakin tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya perkembangan jaringan transportasi yang terhubung secara regional dengan kota-kota lainnya. Kota Depok selain merupakan Pusat Pemerintah yang berbatasan langsung dengan Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, juga merupakan wilayah penyangga Ibu Kota Negara yang diarahkan untuk kota pemukiman, kota pendidikan, pusat pelayanan perdagangan dan jasa, kota pariwisata, dan sebagai kota resapan air. Kota Depok mempunyai keunggulan komparatif apabila dilihat dari letaknya yang sangat strategis baik dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Kota Depok terdiri dari 11 kecamatan yaitu Sawangan, Bojongsari, Pancoran Mas, Cipayung, Sukmajaya, Cilodong, Cimanggis, Tapos, Beji, Limo dan Cinere. Jumlah penduduk Kota Depok tahun 2010 berdasarkan angka sensus 2010 adalah 1.738.570, jumlah penduduk sementara tahun 2020 berdasarkan sensus 2020 adalah 2.056.335. Jumlah penduduk tahun 2021 mengacu pada Kota Depok dalam Angka 2022 sebanyak 2.085.935 jiwa, sementara berdasarkan proyeksi jumlah penduduk untuk 2022 yaitu 2.127.711. Jika menurut kelompok umur dan jenis kelamin yaitu proyeksi jumlah penduduk tahun 2022 untuk laki-laki sebanyak 1.074.088 jiwa dan perempuan sebanyak 1.053.632 jiwa (Tabel 1). Jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 sebesar 101,94.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Depok (Jiwa)

Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
0 - 4	89,238	84,640	173,878	105.43
5 - 9	86,004	82,604	168,608	104.12
10 -14	93,711	86,961	180,672	107.76
15 - 19	88,365	83,703	172,068	105.57
20 - 24	84,579	81,938	166,517	103.22
25 - 29	85,845	86,349	172,194	99.42
30 - 34	89,408	91,808	181,216	97.39
35 - 39	89,788	89,672	179,460	100.13
40 - 44	89,686	86,767	176,453	103.36
45 - 49	78,961	76,177	155,138	103.65
50 - 54	66,165	64,148	130,313	103.14
55 - 59	50,623	50,647	101,270	99.95
60 - 64	35,448	36,561	72,009	96.96
65 - 69	24,038	25,396	49,434	94.65
70 - 74	12,459	13,961	26,420	89.24
75+	9,770	12,291	22,061	79.49
Jumlah	1,074,088	1,053,623	2,127,711	101.94

Keterangan: hasil perhitungan

Tabel 2 memberikan gambaran mengenai proyeksi pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok pengeluaran di Kota Depok untuk tahun 2022. Rata-rata pengeluaran untuk kelompok 10% terbawah adalah sejumlah Rp. 724.463 per kapita per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar Rp. 346.156 per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar Rp. 915.069 per orang setiap bulannya. Besaran pengeluaran meningkat seiring dengan meningkatnya kelompok pengeluaran. Rata-rata pengeluaran pada kelompok 10% teratas adalah sebesar Rp. 7.289.872 per kapita per bulan, melonjak hampir 1.7 kali lipat dibandingkan kelompok pengeluaran di bawahnya yang sebesar Rp. 4.260.131 per orang per bulan. Pengeluaran minimum pada kelompok ini tercatat sebesar Rp. 5.012.934 per kapita per bulan dan pengeluaran maksimumnya sebesar Rp. 23.106.293 per orang setiap bulannya.

Tabel 2 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Kota Depok Tahun 2022

No	Kelompok Pengeluaran (Rp)	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan			
		Rata-rata (Rp)	Minimum (Rp)	Maksimum (Rp)	Simpangan Baku (Rp)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1	<=915.069,48	724.463	346.156	915.069	133.087
2	915.069,48 - 1.201.414,82	1.065.793	918.133	1.201.415	83.628
3	1.201.414,8 - 1.458.875,43	1.330.852	1.207.563	1.458.875	69.121
4	1.458.875,43 - 1.792.361,71	1.635.880	1.459.714	1.792.362	85.187
5	1.792.361,71 - 2.057.778,81	1.930.029	1.798.397	2.057.779	80.691
6	2.057.778,81 - 2.543.489,85	2.313.466	2.061.003	2.543.490	123.521
7	2.543.489,85 - 3.007.303,95	2.757.845	2.552.441	3.007.304	133.781
8	3.007.303,95 - 3.681.530,78	3.335.574	3.013.156	3.681.531	197.095
9	3.681.530,78 - 5.011.343,74	4.260.131	3.686.421	5.011.344	390.871
10	>5.011.343,74	7.289.872	5.012.934	23.106.293	3.085.562

Keterangan: hasil proyeksi

Salah satu indikator perekonomian dalam suatu wilayah adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan komposisi PDRB menurut sektoral dapat diketahui struktur perekonomian suatu wilayah. Sedangkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan dari waktu ke waktu menunjukkan besarnya laju pertumbuhan ekonomi. Besarnya proyeksi PDRB Kota Depok atas dasar harga berlaku tahun 2019 sampai dengan 2022 secara berurutan ialah Rp. 70.964.040, Rp. 70.382.870, Rp. 74.374.260 dan Rp.78.371.876. Penurunan PDRB pada tahun 2020 disebabkan melemahnya ekonomi pada era pandemic COVID-19. Dari jumlah tersebut, sumbangan terbesar dihasilkan oleh konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan agregat dari pertumbuhan di setiap sektor ekonomi yang ada. Bagi setiap daerah, indikator ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, serta berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang (BPS, 2001).

Tabel 3 memberikan gambaran mengenai persentase penduduk menurut lapangan usaha dan kelompok pengeluaran pada tahun 2021. Sebagian besar penduduk pada kelompok 10% pengeluaran terbawah dan kelompok 10%

pengeluaran teratas menjadikan sektor jasa dan lainnya sebagai lapangan usahanya. Sektor Perdagangan, hotel, dan rumah makan merupakan lapangan usaha tertinggi kedua dari kedua kelompok pengeluaran dengan masing-masing persentasenya adalah 27,42% untuk kelompok 10% pengeluaran terendah dan 15,21% untuk kelompok 10% pengeluaran teratas. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa Sektor Pertambangan dan penggalian menjadi lapangan usaha paling rendah di antara semua sektor lapangan usaha yang ada.

Tabel 3 Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha dan Kelompok Pengeluaran Tahun 2022

Lapangan Usaha	Kelompok Pengeluaran (Rp)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Pertanian	1,66	0,59	0,62	0,00	0,00	1,22	1,64	0,00	1,04	0,00
Pertambangan dan penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	3,05	1,01
Industri Pengolahan	10,45	6,52	12,88	11,51	9,66	10,58	10,22	6,36	6,75	10,43
Listrik, Air dan Gas	2,18	3,33	0,00	0,91	1,20	1,26	1,23	3,79	1,66	2,71
Konstruksi/bangunan	13,83	14,46	13,15	13,62	13,74	5,56	11,80	11,32	6,50	11,40
Perdagangan, hotel, dan rumah makan	17,82	18,51	26,23	22,12	28,52	30,68	22,01	18,83	27,73	16,07
Transportasi, pergudangan, informasi dan komunikasi	13,85	15,13	11,40	10,38	18,38	7,19	9,36	5,63	2,70	7,65
Keuangan dan asuransi	0,00	2,30	1,80	1,94	6,33	3,71	4,17	6,85	7,08	2,44
Jasa dan lainnya	40,21	39,16	33,92	39,51	32,17	39,82	39,57	45,89	43,49	48,29
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Keterangan: hasil proyeksi

Pendidikan merupakan salah satu peubah yang dianggap berperan cukup penting dalam masalah kesenjangan. Hal tersebut karena investasi pada sumber daya manusia mempunyai pengaruh terhadap penghasilan pendapatan. Tabel 4 menyajikan persentase penduduk menurut kelompok pengeluaran dan tingkat Pendidikan. Untuk kelompok pengeluaran 10% terendah terlihat bahwa kelompok ini mayoritas adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah

SLTA/ sederajat diikuti tingkat pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Hanya sekitar 2,26% penduduk pada kelompok pengeluaran ini yang berpendidikan universitas.

Tabel 4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran dan Tingkat Pendidikan

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	<SD	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SLTA/ sederajat	Universitas	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
<=915.069,48	0,00	34,99	22,07	40,69	2,26	100
915.069,48 - 1.201.414,82	2,35	13,47	23,52	57,92	2,75	100
1.201.414,8 - 1.458.875,43	1,63	16,50	18,36	56,99	6,53	100
1.458.875,43 - 1.792.361,71	0,99	17,89	21,84	46,73	12,54	100
1.792.361,71 - 2.057.778,81	1,53	16,69	25,32	40,98	15,49	100
2.057.778,81 - 2.543.489,85	0,84	17,58	14,10	46,83	20,65	100
2.543.489,85 - 3.007.303,95	0,00	10,92	16,10	45,32	27,66	100
3.007.303,95 - 3.681.530,78	0,00	5,52	8,33	37,71	48,44	100
3.681.530,78 - 5.011.343,74	0,82	4,45	7,72	38,03	48,98	100
>5.011.343,74	0,00	4,44	5,05	39,44	51,08	100

Keterangan: hasil proyeksi

Sebaliknya pada kelompok pengeluaran 10% teratas, sebagian besar penduduk merupakan lulusan Universitas dan SLTA/ sederajat. Pada kelompok ini, 39,44% penduduk tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA/ sederajat dan 51,08% Universitas. Namun ada sekitar 4,44% tingkat pendidikan SD/ sederajat pada kelompok pengeluaran ini, dan 5,05% untuk tingkat pendidikan SMP/ sederajat.

3.2. Indeks Gini Kota Depok tahun 2022

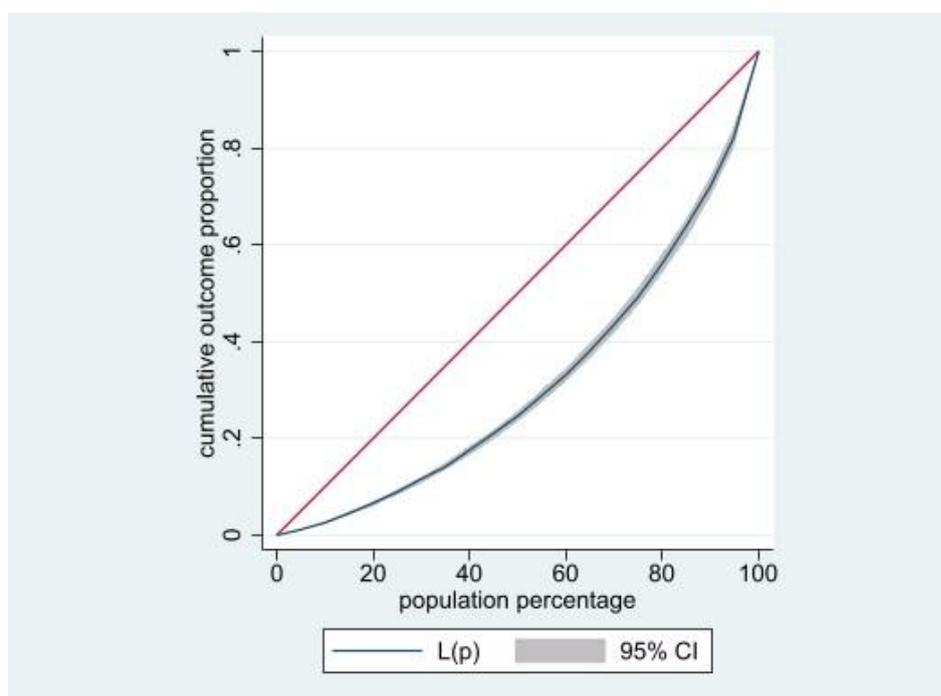
Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pengeluaran per kapita per bulan di Kota Depok tahun 2022, ada sekitar 213.502 jiwa dari jumlah penduduk Kota Depok yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terendah berada di Rp. 724.462. Sedangkan ada 211.974 jiwa yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan tertinggi berada di Rp. 7.289.926 (Tabel 5).

Tabel 5 Hitung Indeks Gini Tahun 2022 di Kota Depok

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/Kapita/Bulan)	Proporsi Jumlah Penduduk	%P	Pendapatan [C]	%C [fc]	fp* [Fc+Fc-1]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<=915.069,48	724.463	213.502	0,10034	154.674.295.996	0,0273	
915.069,48 - 1.201.414,82	1.065.793	213.167	0,10019	227.191.915.474	0,0401	0,0095
1.201.414,8 - 1.458.875,43	1.330.852	214.061	0,10061	284.883.583.283	0,0503	0,0186
1.458.875,43 - 1.792.361,71	1.635.880	210.780	0,09906	344.810.685.579	0,0609	0,0294
1.792.361,71 - 2.057.778,81	1.930.029	215.338	0,10121	415.608.501.079	0,0734	0,0436
2.057.778,81 - 2.543.489,85	2.313.466	212.065	0,09967	490.605.261.972	0,0867	0,0589
2.543.489,85 - 3.007.303,95	2.757.845	210.944	0,09914	581.750.826.193	0,1028	0,0774
3.007.303,95 - 3.681.530,78	3.335.574	214.199	0,10067	714.476.546.092	0,1262	0,1016
3.681.530,78 - 5.011.343,74	4.260.131	211.681	0,09949	901.792.964.645	0,1593	0,1288
>5.011.343,74	7.289.872	211.974	0,09963	1.545.277.905.297	0,2730	0,1721
Jumlah		2.127.711	1,00000	5.661.072.485.611	1,0000	0,6398
Gini Ratio 2022	0,360					

Keterangan: hasil proyeksi

Indeks Gini sebagai indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Kota Depok pada tahun 2022 tercatat sebesar 0,360. Dibandingkan dengan Indeks Gini tahun 2020 (0,342) dan 2021 (0,354), maka Indeks Gini Kota Depok mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang dirilis dari biro pusat statistik pusat dan provinsi, Maret 2022 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Indeks Gini adalah sebesar 0,384 dan 0,417 untuk provinsi Jawa Barat sehingga kondisi ketimpangan di Kota Depok lebih rendah dibandingkan Nasional dan Jawa Barat. Namun Indeks Gini Kota Depok tahun 2022 ini, masih masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Hal ini didukung dengan kurva Lorenz Kota Depok untuk tahun 2022 ditunjukkan dengan jarak antara kurva dengan garis diagonalnya relatif tidak terlalu melebar (Gambar 2).



Gambar 2 Kurva Lorenz Kota Depok 2022

3.3. Nilai tingkat Ketimpangan menurut Bank Dunia Kota Depok Tahun 2022

Salah satu kriteria kesenjangan yang diukur oleh Bank Dunia adalah dengan melihat persentase pengeluaran yang dilakukan oleh 40% penduduk berpendapatan terendah terhadap total pengeluaran di suatu wilayah. Pada prinsipnya Kriteria Bank Dunia membagi penduduk ke dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yaitu 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah, 40% kelompok penduduk berpendapatan sedang dan 20% kelompok berpendapatan tinggi.

Jika ketimpangan dilihat berdasarkan ukuran Bank Dunia, pada Tahun 2022 di Kota Depok kelompok pengeluaran 40% terendah persentase pengeluarannya sebesar 17,9% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 851.510 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 1.189.247. Kelompok pengeluaran 40% menengah persentase pengeluarannya sebesar 38,9 % dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 852.544 jiwa dan rata-

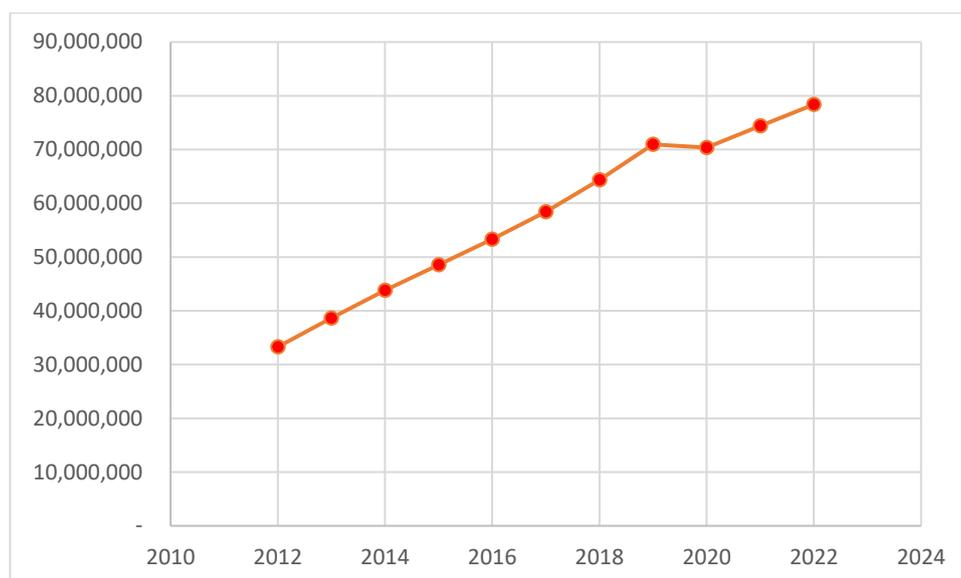
rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp.2.584.228. Sementara kelompok pengeluaran 20% teratas persentase pengeluarannya 43,2% dengan proporsi jumlah penduduk pada kelompok ini 423.657 jiwa dan rata-rata pengeluaran per bulan per kapitanya sebesar Rp. 5.775.001 (Tabel 6). Berdasarkan fakta tersebut, tingkat ketimpangan di Kota Depok berdasarkan ukuran Bank Dunia pada tahun 2022 dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk tergolong pada ketimpangan pendapatan rendah. Hal ini dapat dilihat dari proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17%.

Tabel 6 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok Tahun 2022

Kelompok Pengeluaran (Rp)	Jumlah Anggota Rumah Tangga (Jiwa)	Mean per kapita per bulan (Rp)	Jumlah Pengeluaran (Rp)	Persentase Pengeluaran
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
40% terendah	851.510	1.189.247	1.012.655.699.649	17,9
40% menengah	852.544	2.584.228	2.203.173.584.471	38,9
20% teratas	423.657	5.775.001	2.446.625.497.956	43,2
Total	2.127.711	9.548.477	5.662.454.782.076	100

3.4. Analisis Ketimpangan Ekonomi Kota Depok Tahun 2012-2022

Jumlah penduduk Kota Depok pada periode sepuluh tahun terakhir (2011-2021) berkisar antara 1.813.613 jiwa (tahun 2011, depokkota.bps.go.id) sampai dengan 2.085.940 jiwa (tahun 2021, Depok dalam Angka 2022). Berdasarkan data yang dipublikasi BPS Kota Depok (Kota Depok dalam Angka 2022), tahun 2021 kepadatan penduduk Kota Depok mencapai 10.415 penduduk per km². Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi, dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Cipayung yaitu sebesar 15.371 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Sawangan sebesar 7.060 jiwa/km².



Catatan : PDRB 2020 sd 2022 hasil proyeksi

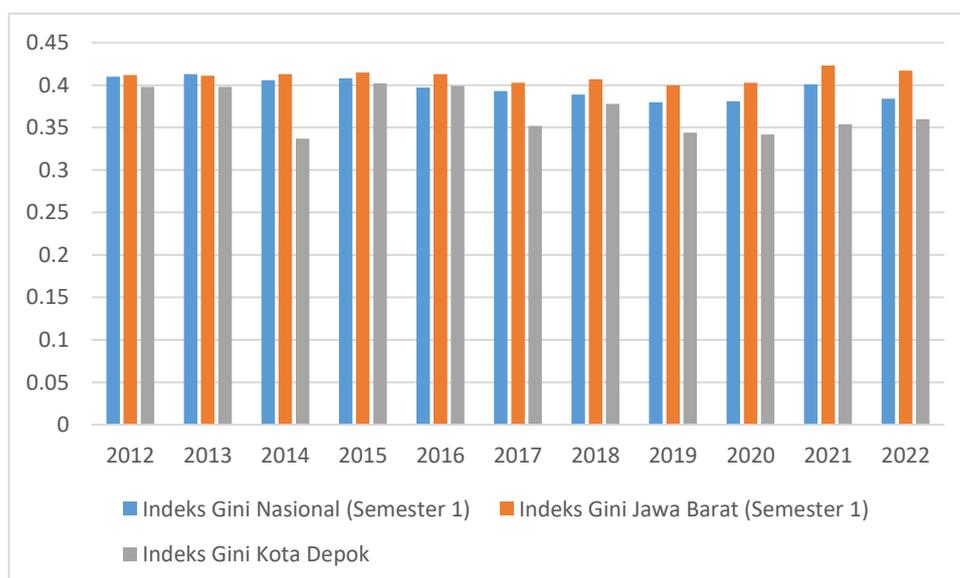
Gambar 3 PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Tabel 7 menyajikan PDRB Kota Depok pada periode 2012-2022 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah). Pada periode tersebut, selain pada tahun 2020, nilai PDRB Kota Depok selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan nilai minimum sebesar Rp. 33.283.562 pada tahun 2012, dan nilai maksimum sebesar Rp. 78.371.876, berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2022 (Gambar 3). Peningkatan PDRB pada periode 2012-2022 berfluktuasi pada kisaran 8,69% (tahun 2016-2017) sampai dengan 13,83% (tahun 2012-2013). Meskipun pada tahun 2020 diperkirakan terjadi penurunan PDRB dari tahun 2019 sebesar 0,83%, namun secara umum pada periode 2012-2021, PDRB Kota Depok mengalami peningkatan sekitar 8,4 %. Secara rata-rata, PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran pada periode 2012-2022 adalah sebesar Rp. 57.676.869.

Tabel 7 PDRB Kota Depok 2012-2022 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB Kota Depok Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)
[1]	[2]
2012	33.283.562
2013	38.627.196
2014	43.806.035
2015	48.532.645
2016	53.331.051
2017	58.408.777
2018	64.363.244
2019	70.964.040
2020*	70.382.870
2021*	74.374.260
2022*	78.371.876

Catatan : *hasil proyeksi



Catatan : BPS dan *hasil proyeksi

Gambar 4 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2012-2022

Tabel 8 menampilkan Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok pada periode 2012-2022. Terlihat bahwa pada periode tersebut, kecuali pada tahun 2016 yang sedikit di atas Nasional, Indeks Gini Kota Depok selalu lebih

rendah daripada yang terjadi pada skala nasional maupun propinsi Jawa Barat (Gambar 4). Khusus di Kota Depok, Indeks Gini tersebut berfluktuasi pada kisaran 0,398 (tahun 2012) sampai dengan 0,360 (tahun 2022). Pada periode 2012-2022, rata-rata Indeks Gini Kota Depok adalah sebesar 0,369, yang lebih rendah dari Indeks Gini Nasional (0,397) dan Indeks Gini Propinsi Jawa Barat (0,411). Rata-rata ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran di Kota Depok pada periode 2012-2022 masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Dua tahun terakhir, terjadi peningkatan Indeks Gini di Kota Depok artinya ada penurunan pemerataan pendapatan di Kota Depok, hal ini kemungkinan diakibatkan efek dari wabah Covid-19 pada tahun 2020.

Tabel 8 Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kota Depok 2012-2022

Tahun	Indeks Gini Nasional (Semester 1)	Indeks Gini Jawa Barat (Semester 1)	Indeks Gini Kota Depok
2012	0,410	0,412	0,398
2013	0,413	0,411	0,398
2014	0,406	0,413	0,337
2015	0,408	0,415	0,402
2016	0,397	0,413	0,399
2017	0,393	0,403	0,352
2018	0,389	0,407	0,378
2019	0,380	0,400	0,344
2020	0,381	0,403	0,342
2021	0,401	0,423	0,354
2022*	0,384	0,417	0,360

Sumber : BPS, diolah, *hasil proyeksi

Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan dua hal yang bertolak belakang tetapi hubungannya sering menjadi bahan kajian baik peneliti sosial maupun ekonomi, hal tersebut dikarenakan konsekuensi dari pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan sesuatu yang positif, tetapi menimbulkan juga dampak sampingan yang bisa jadi tidak diinginkan. Selama tahun 2012-2021 (Tabel 9), pertumbuhan ekonomi Kota Depok cukup tinggi (selalu di atas 6% selama periode 2012 sampai dengan 2019 dan angka pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Namun pada tahun 2020, berdasarkan Buku Kota Depok dalam angka 2021,

pertumbuhan ekonomi Kota Depok terjadi pada titik terendah yaitu -1,92. Hal ini terjadi karena efek pandemi COVID-19 dan hampir di seluruh kota di Indonesia pertumbuhan ekonominya negatif. Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Depok mulai naik kembali di angka 3,76. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama periode 2012-2021 yang tinggi masih disertai dengan adanya ketimpangan begitu juga ketika terjadi pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas atau belum inklusif.

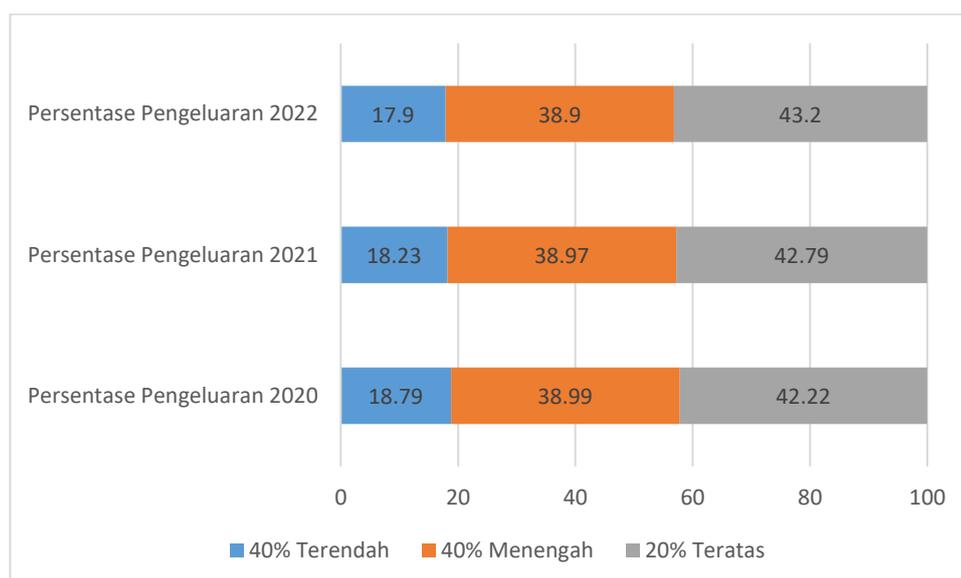
Tabel 9 Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Depok d 2012-2021

Tahun	Pertumbuhan ekonomi	Gini Ratio
[1]	[2]	[3]
2012	8,06	0,398
2013	6,85	0,398
2014	7,28	0,337
2015	6,63	0,402
2016	7,28	0,399
2017	6,75	0,352
2018	6,97	0,378
2019	6,74	0,344
2020	-1,92	0,342
2021	3,76	0,354

Sumber : BPS Kota Depok, olah

Gambar 5 menyajikan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia di Kota Depok untuk tiga tahun terakhir (2020 – 2022). Kelompok pengeluaran 40% terendah pada tahun 2022, persentase pengeluarannya terkecil dibandingkan tahun 2020 dan 2021. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran ini berturut-turut dari tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah Rp. 1.040.702, Rp.1.134.531 dan Rp. 1.189.247 (Tabel 10). Terlihat adanya kenaikan dari tahun ke tahun. Sementara untuk 20% teratas, persentase pengeluaran tahun 2022 berada lebih besar dibandingkan dua tahun lainnya. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk kelompok pengeluaran teratas ini, rata-rata tertinggi ada pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 5.775.001, sementara

pada tahun 2021 ada pada angka Rp. 5.363.787. Berdasarkan perbandingan nilai tingkat ketimpangan menurut Bank Dunia, tingkat ketimpangan di Kota Depok selama tiga tahun terakhir masuk dalam kategori ketimpangan pendapatan rendah, karena proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk selama tiga tahun terakhir lebih dari 17%.



Gambar 5 Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia 2020-2022

Tabel 10 Rata-rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran Berdasarkan Ukuran Bank Dunia di Kota Depok 2020-2022

Kelompok Pengeluaran	40% Terendah	40% Menengah	20% Tertinggi
[1]	[2]	[3]	[4]
Rata-rata pengeluaran 2020	1.040.702	2.160.524	4.695.163
Rata-rata pengeluaran 2021	1.134.531	2.429.081	5.363.787
Rata-rata pengeluaran 2022	1.189.247	2.584.228	5.775.001

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a) Indeks Gini Kota Depok Tahun 2022 sebesar 0.360 dan masuk dalam kategori ketimpangan sedang.
- b) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, persentase pengeluaran kelompok pengeluaran 40% terendah di Kota Depok pada tahun 2022 sebesar 17.9%, sehingga tergolong pada ketimpangan rendah.
- c) Berdasarkan Indeks Gini di Kota Depok pada periode sepuluh tahun terakhir (2012-2022), ketimpangan pendapatan yang didekati melalui ketimpangan pengeluaran masuk dalam kategori ketimpangan sedang. Meskipun Indeks Gini 2022 Kota Depok diproyeksi lebih tinggi 0.006 poin dibandingkan tahun 2021.
- d) Berdasarkan ukuran Bank Dunia, selama periode 2020 sampai dengan 2022, di Kota Depok selalu berada pada tingkat ketimpangan rendah.

4.2. Saran

- a) Pertumbuhan ekonomi Kota Depok selama tahun 2012-2021 cukup tinggi, yang selalu di atas 6%, sementara mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 efek dari pandemi COVID-19. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Depok masih lebih banyak dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, sehingga pembangunan Kota Depok harus lebih fokus memperhatikan *inclusive growth* dari pada pertumbuhan ekonomi secara umum.
- b) Pemerintah Kota Depok hendaknya mengembangkan berbagai upaya kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan golongan masyarakat yang kurang tersentuh dari hasil-hasil pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bae, K., D. Han, and H. Sohn. 2012. Importance of Access to Finance in Reducing Income Inequality and Poverty Level. *International Review of Public Administration* 17 (1): 55–77.
- Chongvilaivan, A. and J. Kim. 2013. Individual income inequality and its drivers in Indonesia: A theil decomposition reassessment. *Social Indicators Research*. 1–20
- de Silva, I. and S. Sumarto. 2013. Poverty-growth inequality triangle: the case of Indonesia. TNP2K Working Paper. [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle\(1\).pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/WP4-PovertyTriangle(1).pdf)
- Howkins, J. (2002). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. Penguin Books Limited.
- Kemenparekraf. 2014. *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
- Seidman, K. F. (2005). *Economic Development Finance*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- The Equality Trust. 2011. "Income inequality: Trends and Measures." *Equality Trust Research Digest*; no.2: pp.1–8
- Wan, G. and Z. Zhou. 2004. Income Inequality in Rural China: Regression-based Decomposition Using Household Data (No. 2004/51). *WIDER Discussion Papers/World Institute for Development Economics (UNU-WIDER)*.
- Wicaksono E, Amir H, and Nugroho A. 2017. The Sources of Income Inequality in Indonesia: a Regression-Based Inequality Decomposition. *ADB Working Paper Series*.
- World Bank. 2016. *Indonesia's rising divide*. Washington, DC: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/267671467991932516/Indonesia-rising-divide>
-



**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KOTA DEPOK**

Gedung Dibaleka II
Komplek Balaikota Depok Lantai 7
Jl. Margonda Raya No. 54 Depok
Telp. (021) 29402276 dan (021) 7764410
Email: diskominfo@depok.go.id

